

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. 2, Toko Agung Tbk, Jakarta,
- A.M. Yunus Wahid, 2018. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*. Jakarta: Prenamedia Group
- A.R. Soehoed. 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit*, Jakarta, Djambatan..
- A. Sonny Keraf, 2010, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, Yogyakarta.
- Anslem Strause dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Badan statistik Kota Makassar, 2020, *Kota Makassar Dalam Angka*, BPS Kota Makassar, hlm 31
- Charles, 2001, *Fishery Conflicts : A unified Framework. Policy*. Edisi Terjemahan oleh Widodo. Gajah Mada Press. Jogjakarta.
- Gunawan Dj, *Perlindungan Hukum Hak Penangkapan Ikan Nasional Tradisional Di Kabupaten Majene, Makassar. Tahun 2005*, Hlm.2.
- H.Salim HS., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Imron, Mulyadi. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Jeremy Bentham. 2015, *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-prinsip legislasi, hukum pidana dan hukum perdata)*, PT. Nuansa Cendekia, Surabaya
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Jember: lembaga penelitian universitas jember.
- Modul Terapan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.

Sidarta,M,1998, *Reklamasi? Tidak Reklamasi? Prosiding Konferensi Nasional I Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Indonesia*.PKSPL IPB-CRC-University of Rhode Island.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra aditya Bakti.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

Wisnu Suharto. 1996. *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*,Semarang, Unika Soegijapranata.

Skripsi dan Disertasi:

Andi Sulfikal MST.2012. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Atas Penangkapan ikan Di Kabupaten Pangkep. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Yusticia Zahrani.2017. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kahar. 2016. Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan,Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Makassar.

Jurnal:

H.J. Mukono, 2015, Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development), Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005 : 19 - 28 (e-Journal), Vol. 2, Nomor 1, Juli, hlm. 21. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-KESLING-2-1-03.pdf>, diakses pada tanggal 1 April Januari 2020, pukul 11.40.

Raynaldo Sembiring. 2019. Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 3 (2). 186-203. <DOI: 10.24970/jbhl.v3n2.14>.

Hlm. 187

Nursanti dkk, "strategi pengembangan mata pencaharian alternatif untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan di pulau kodingareng kota makassar". Pps universitas muslim indonesia, vol. 1, no 1, december 2018 hal 49-58

Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 34 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambakan Garam

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Website:

Esmi Warassih “pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis” diakses dari <https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/pranata-hukum-sebuah-telaah-sosiologis/> pada tanggal 29 Maret 2021 pada pukul 16.21 WITA

<https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 22.05 Wita

<https://makassar.terkini.id/proyek-reklamasi-mnp-rugikan-nelayan-walhi-sulsel-minta-pemerintah-bertanggung-jawab/> di akses tanggal 24 Maret 2021 pukul 16.16 WITA

<https://www.walhi.or.id/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng> di akses 26 Maret 2021 pukul 14.00 WITA

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4291> di akses tanggal 10 Agustus 2021 pukul 18.57 Wita

LAMPIRAN GAMBAR



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan



Lokasi Penambangan Pasir Laut MNP



Kantor Makassar New Port



Pulau Kodingareng

Wawancara dengan Masyarakat Kodingareng



Wawancara dengan WALHI

